



PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SENO SAMODRO.

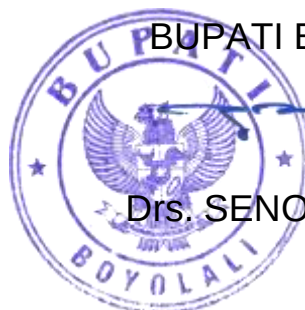
Jabatan : Bupati Boyolali.

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Boyolali, 9 Januari 2020

BUPATI BOYOLALI,



Drs. SENO SAMODRO

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	82,2 Nilai	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	1.402.500.165.952 Rp	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	1013 Investor	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	4 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.414.322 m2	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,15 %	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	1540 unit	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	2 desa/kel	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy)	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ditindak lanjuti	100 %	DLH
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	18 %	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	74,72 %	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	3.500 m	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	88,98 %	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	7.740 m	DPUPR
		14 Prosentase ketersediannya air baku	9,26 %	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	90 %	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	14,05 %	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	79,98 %	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	88,09 %	DPUPR
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	95 %	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	2000 Titik lampu	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35 Unit	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100 %	DISHUB
		23 Cakupan ketersediaan kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100 %	DISHUB
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,038 %	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	8 Peringkat	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	1 Klub olahraga	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	4 Lapangan	DISPORAPAR
		28 Cakupan Ketersediaan buku yang tersedia di perpustakaan daerah	74 %	DINAS ARPUS
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	12,66 %	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	100 %	DINAS ARPUS

8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31	Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada dokuman	BP3D
		32	Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada dokuman	BP3D
		33	Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada dokuman	SETDA
		34	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70 skor	SETDA
		35	Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 %	BP3D
		36	Prosentase Peningkatan PAD	10,50 %	BKD
		37	Opini laporan keuangan daerah	WTP Opini	BKD
		38	Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		39	Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		40	Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	26 temuan/ rekomendasi	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41	Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	5 dokuman	SETDA
		42	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 dokuman	SETDA
		43	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	67 skor	SETDA
		44	Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	82,5 %	BKP2D
		45	Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100 %	BKP2D
		46	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	76 %	SETDA
		47	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	62 dokuman	SETDA
		48	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	79,75 skor	SETDA
		49	Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	90 %	SETDA
		50	Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	DISPENDUKCAPIL
		51	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 %	DISPENDUKCAPIL
		52	Persentase fasilitasi layanan persandian	100 %	DISKOMINFO
		53	Kualitas layanan e-procurement	80,50 skor	SETDA
		54	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	8 Media	DISKOMINFO, SETDA

		55	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokuman	DISKOMINFO
		56	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	85 %	BP3D
		57	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 %	DINAS ARPUS
		58	Cakupan Pengelolaan arsip daerah	55 %	DINAS ARPUS
		59	Prosentase sanggahan lelang	4,4 %	SETDA
		60	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
		61	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	69 %	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	85,71 %	KANKESBANGPOL
		63	Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	90 %	SATPOL PP
		64	Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	95 %	SATPOL PP
		65	Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	98,78 %	SATPOL PP
		66	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	82 %	KANKESBANGPOL
		67	Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	88,37 %	KANKESBANGPOL
		68	Indeks Resiko Bencana	90 %	BPBD
		69	Cakupan kebakaran yang tertangani	77 %	SATPOL PP
		70	Cakupan penanganan PMKS	37,77 %	DINSOS
		71	Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70 perusahaan	DISKOPNAKER
		72	Tingkat penyerapan tenaga kerja	37,2 %	DISKOPNAKER
		73	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240 orang	DISKOPNAKER
		74	Rasio rumah layak huni	88 %	DPKP
		75	Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	2,2 Ha	DPKP
		76	Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	84 %	DP2KBP3A
		77	Cakupan Peserta KB.	80 %	DP2KBP3A
		78	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	1,4 %	DP2KBP3A
		79	Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) yang Aktif.	75,90 %	DP2KBP3A
		80	Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	21 %	DP2KBP3A
		81	Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	78 %	DP2KBP3A
		82	Desa layak anak	31 desa	DP2KBP3A
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83	UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	30 UMKM	DISKOPNAKER
		84	Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	50 koperasi	DISKOPNAKER
		85	Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	54 %	DISKOPNAKER
		86	Kelompok binaan PKK	287 kelompok	DISPERMASDES
		87	Jumlah LSM	267 lembaga	DISPERMASDES

		88	Jumlah PKK aktif	287 kelompok	DISPERMASDES
		89	Posyandu aktif	1473 unit	DISPERMASDES
		90	Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	84 %	DISPERMASDES
		91	Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	221 lembaga	DISPERMASDES
12.	Meningkatnya Derajat kesehatan	92	Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4 per 1000 kh	DINKES
		93	Kasus Kematian Ibu	19 kasus	DINKES
		94	Penurunan Angka Kematian Balita	10,5 per 1000	DINKES
		95	Cakupan kunjungan bayi	90 %	DINKES
		96	Cakupan pelayanan anak balita	95 %	DINKES
		97	Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100 %	DINKES
		98	Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90 %	DINKES
		99	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	39,6 %	DINKES
		100	Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	98 %	DINKES
		101	Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	45 %	DINKES
		102	Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	45 %	DINKES
		103	Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	48 per 100.000	DINKES
		104	Angka kematian DBD (CFR)	1,7 % dari jumlah penderita	DINKES
		105	Prosentase jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil	40 %	DINKES
		106	Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	> 80 %	DINKES
		107	Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	50 %	DINKES
		108	Cakupan Desa UCI	100 %	DINKES
		109	Puskesmas Terakreditasi	8 puskesmas	DINKES
		110	Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	15 %	DINKES
		111	Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	1,5 %	DINKES
		112	Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90 %	DINKES
		113	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	DINKES
		114	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100 %	DINKES
		115	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	17,24 %	DINKES
		116	Rasio dokter	16,4 %	DINKES
		117	Rasio dokter gigi	5,4 %	DINKES
		118	Rasio perawat	97,6 %	DINKES
		119	Rasio bidan	58 %	DINKES
		120	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	80 %	DINKES
		121	Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	106 desa	DINKES
		122	Proporsi Rumah tangga sehat	74 %	DINKES
		123	Cakupan Desa STBM	200 desa	DINKES
		124	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	99,85 %	RSUD PANDAN ARANG
		125	Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	83,25 %	RSUD SIMO

		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	90 %	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	80,93 %	DISDIKBUD
		128 APK SD	102,00 %	DISDIKBUD
		129 APK SMP	98,40 %	DISDIKBUD
		130 APM SD	86,75 %	DISDIKBUD
		131 APM SMP	73,50 %	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	0,03 %	DISDIKBUD
		133 Angka Putus Sekolah SMP	0,20 %	DISDIKBUD
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	99,25 %	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	94,61 %	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,40 %	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	57,16 %	DISDIKBUD
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	68,44 %	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	20,00 orang	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	20,00 orang	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,21 %	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	93,75 %	DISDIKBUD
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	83,75 %	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	408 IKM	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	1 kawasan	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	9432 unit	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	90 unit	DISDAGPERIN
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	83 %	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200 pelaku usaha	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.189.335 Rp.	DISDAGPERIN
		151 Ekspor bersih perdagangan	158.016 US \$	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,25 %	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produktivitas pangan utama per hektar : Padi	295.855 ton	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:		DISPERTAN
		154 - Jagung	137.767 ton	DISPERTAN
		155 - Kedelai	6.864 ton	DISPERTAN
		Produksi tanaman hortikultura utama		DISPERTAN
		156 - Pepaya	124.872 kuintal	DISPERTAN
		157 - Cabe	114.466 kuintal	DISPERTAN
		158 - Bawang Merah	31.218 kuintal	DISPERTAN
		159 - Jahe	10.667 kuintal	DISPERTAN
		160 - Kencur	17.170 kuintal	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :		DISPERTAN
		161 - Cengkeh	365 ton	DISPERTAN
		162 - Kopi	146 ton	DISPERTAN
		163 - Kelapa	5.307 ton	DISPERTAN
		164 - Tembakau	4.984,79 ton	DISPERTAN
		165 - Tebu	34.520 ton	DISPERTAN
		166 - Lada	23,09 ton	DISPERTAN
		167 - Atsiri	57,13 Kuintal	DISPERTAN
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	25,09 %	DKP
		169 Meningkatnya Cadangan Pangan	100 %	DKP

		170 Skor Pola Pangan Harapan	91 skor	DKP
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	32.002 ton	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan		DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	8.400,00 ton	DISNAKKAN
		173 - Produksi susu (kilo liter)	47.851,00 kilo liter	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	318.381,00 ekor	DISNAKKAN
		175 - Sapi potong	89.275 ekor	DISNAKKAN
		176 - Sapi perah	88.635 ekor	DISNAKKAN
		177 - Kambing dan domba	140.471 ekor	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	71 %	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	92 %	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	51 %	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisata	450.335 orang	DISPORAPAR
		182 Meningkatkan PAD bidang Pariwisata.	1.457.000 Rp (.000)	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	98 %	DISDIKBUD

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	7.348.200.000	APBD dan DID	DPMPTSP
2	Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	34.875.000		DPMPTSP
3	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	12.465.900.000	APBD dan DAK	DLH
4	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	651.600.000		DLH
5	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	665.000.000	APBD, DAK, DBHCHT, dan DID	DLH
6	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	76.700.000		DLH
7	Peningkatan Pengendalian Polusi	741.766.000		DLH
8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	23.593.904.000		DLH
9	Pengelolaan Areal Pemakaman	150.000.000		DLH
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan	64.769.108.000		DPUPR
11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.649.000.000		DPUPR
12	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1.200.000.000		DPUPR
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	22.300.000.000		DPUPR
14	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	8.352.102.000		DPUPR
15	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	7.773.800.000	APBD dan DAK	DPUPR
16	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	39.500.000.000	APBD dan DAK	DPUPR

17	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.427.000.000		DPUPR
18	Pengawasan Jasa Konstruksi	428.060.000		DPUPR
19	Perencanaan Tata Ruang	765.000.000		DPUPR
20	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	110.000.000		DPUPR
21	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	271.500.000		Dishub
22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	178.000.000		Dishub
23	Peningkatan Pelayanan Angkutan	338.832.000		Dishub
24	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	425.000.000		Dishub
25	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.677.493.000	APBD dan DAK	Dishub
26	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	7.785.602.000		Dishub
27	Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	5.500.000.000		Dishub
28	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	501.854.000		Disporapar
29	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	338.000.000		Disporapar
30	Pengembangan Destinasi Pariwisata	3.819.309.200	APBD dan DAK	Disporapar
31	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	634.096.800		Disporapar
32	Pengembangan Kemitraan	774.804.000	APBD dan DAK	Disporapar
33	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	752.442.000		Disporapar
34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	14.210.596.000		Disporapar
35	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	46.000.000		Dinas Arpus
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	7.000.000		Dinas Arpus
37	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	6.500.000		Dinas Arpus
38	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	398.224.000	APBD dan DAK	Dinas Arpus
39	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	15.125.000		BP3D
40	Perencanaan Pembangunan Daerah	1.052.500.000		BP3D
41	Pengembangan Data/Informasi	195.000.000		BP3D
42	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	160.000.000		BP3D
43	Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	120.000.000		BP3D
44	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100.000.000		
45	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	70.000.000		BP3D
46	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70.000.000		BP3D
47	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	6.000.000		BP3D
48	Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	527.750.000		BP3D
49	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	41.500.000		Sekretariat Daerah
50	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	108.500.000		Sekretariat Daerah
51	Kerjasama Pembangunan	100.000.000		Sekretariat Daerah
52	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	50.000.000		Sekretariat Daerah
53	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	1.447.378.000		Sekretariat Daerah
54	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	302.400.000		Sekretariat Daerah
55	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	29.150.000		Sekretariat Daerah
56	Kerjasama informasi dengan mas media	45.000.000		Sekretariat Daerah
57	Penataan Peraturan Perundang-undangan	185.865.000		Sekretariat Daerah
58	Penataan Daerah Otonomi Baru	10.000.000		Sekretariat Daerah
59	Pendidikan politik masyarakat	30.000.000		Sekretariat Daerah
60	Peningkatan Pelayanan Publik	10.000.000		Sekretariat Daerah
61	Perencanaan Pembangunan Daerah	138.000.000		Sekretariat Daerah
62	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	281.000.000		Sekretariat Daerah
63	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.479.218.000		BKD
64	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.536.887.000		BKD
65	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	618.900.000		Inspektorat
66	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	230.400.000		Inspektorat
67	Peningkatan Disiplin Aparatur	490.000.000		BKP2D

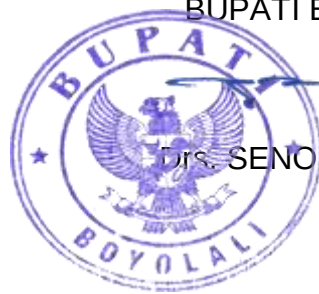
68	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	142.144.000		BKP2D
70	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	3.112.842.000		BKP2D
69	Pendidikan Kedinasan	375.500.000		BKP2D
71	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.802.988.000		BKP2D
72	Penataan Administrasi Kependudukan	5.189.409.000		Dispendukcapil
73	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.448.597.000		Diskominfo
74	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	324.095.000		Diskominfo
75	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	56.000.000		Diskominfo
76	Kerjasama informasi dengan mas media	3.137.000.000		Diskominfo
77	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	25.611.214.000		Sekretariat DPRD
78	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	9.750.000		Kankesbangpol
79	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	372.568.000		Kankesbangpol
80	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	35.750.000		Kankesbangpol
81	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	4.800.000		Kankesbangpol
82	Pendidikan Politik Masyarakat	100.300.000		Kankesbangpol
83	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.051.328.000		Satpol PP
84	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	212.600.000		Satpol PP
85	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	463.070.000		Satpol PP
86	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	2.400.000		Satpol PP
87	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	2.425.408.000		BPBD
88	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	220.400.000		Dinsos
89	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.486.045.000		Dinsos
90	Pembinaan Anak Terlantar	1.672.100.000		Dinsos
91	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	198.440.000		Dinsos
92	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	53.600.000		Dinsos
93	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	65.900.000		Dinsos
94	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	35.700.000	DBHCHT dan APBD	Diskopnaker
95	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	29.800.000		Diskopnaker
96	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	365.107.000		Diskopnaker
97	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.480.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
98	Peningkatan Kesempatan Kerja	198.375.000		Diskopnaker
99	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	120.085.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
100	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	104.500.000		Diskopnaker
101	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	382.550.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
102	Pengembangan Perumahan	1.401.350.000		DPKP
103	Bansos RTLH (lewat BKD)	12.135.262.000	DAK dan APBD	DPKP
104	Keluarga Berencana	6.522.938.000	DAK dan APBD	DP2KBP3A
105	Keserasian Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	4.500.000		
106	Kesehatan Reproduksi Remaja	42.200.000		DP2KBP3A
107	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	33.500.000		DP2KBP3A
108	Pelayanan Kontrasepsi	33.750.000		DP2KBP3A
109	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	5.200.000		DP2KBP3A
110	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	112.800.000		DP2KBP3A
111	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	7.500.000		DP2KBP3A
112	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	2.400.000		DP2KBP3A
113	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	9.250.000		DP2KBP3A

114	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	1.000.000		DP2KBP3A
115	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	538.520.000		DP2KBP3A
116	Peningkatan Informasi Kepedudukan dan KB	72.390.000		DP2KBP3A
117	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	235.000.000		Dispermasdes
118	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	25.000.000		Dispermasdes
119	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	150.000.000		Dispermasdes
120	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	440.000.000		Dispermasdes
121	Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.659.392.500	APBD dan DAK	Dinkes
122	Upaya Kesehatan Masyarakat	18.400.338.000	APBD dan DAK	Dinkes
123	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.011.000.000	APBD dan DAK	Dinkes
124	Pengembangan Lingkungan Sehat	9.654.250.000	APBD dan DAK	Dinkes
125	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2.077.746.000	DAK	Dinkes
126	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8.620.000.000	DAK	Dinkes
127	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	180.052.000	APBD dan DAK	Dinkes
128	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	4.454.734.500	DAK	Dinkes
129	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	17.000.000.000	APBD dan Pajak Rokok	Dinkes
130	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.048.201.000	APBD dan DAK	Dinkes
131	Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	106.840.000		Dinkes
132	Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	35.000.000		Dinkes
133	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD	43.587.399.000	APBD (In Out BLUD)	Dinkes
134	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	113.500.000.000		RSUD PA
135	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	15.335.450.182	DAK, DID, dan DBHCHT	RSUD PA
136	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	15.588.555.000	BLUD	RSUD Simo
137	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	24.677.266.909	APBD dan DAK	RSUD Simo
138	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	6.146.985.909	DID, DAK, dan DBHCHT	RSUD Waras Wiris
139	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.084.000.000	Pajak Rokok dan APBD	RSUD Waras Wiris
140	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	11.582.500.000	BLUD	RSUD Waras Wiris
141	Pendidikan Anak Usia Dini	902.940.000	DAK PAUD (APBN)	Disdikbud
142	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	105.701.925.000	BOS SD dan SMP, DAK SD, DAK SMP (APBN)	Disdikbud
143	Pendidikan Non Formal	1.147.797.000	DAK SKB (APBN)	Disdikbud
144	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.273.000.000		Disdikbud
145	Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.862.000.000		Disdikbud
146	Pengembangan Nilai Budaya	3.301.500.000	DBHCHT (APBN) dan APBD	Disdikbud
147	Pengelolaan Kekayaan Budaya	706.750.000	DAK Non Fisik BOP Museum (APBN) dan APBD	Disdikbud
148	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.175.000.000		Disdikbud
149	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	45.084.000	DBHCHT	Disdagperin
150	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.196.144.000	APBD dan DAK	Disdagperin
151	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	135.293.000	DBHCHT	Disdagperin
152	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	166.417.000		Disdagperin
153	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	119.373.000	DBHCHT	Disdagperin
154	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	53.064.033.000	APBD dan DAK	Disdagperin
155	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	10.000.000		Disdagperin
156	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.032.800.000		Disperantan

157	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	230.000.000		Dispertan
158	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	220.000.000		Dispertan
159	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	7.145.768.000	APBD dan DAK	Dispertan
160	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	27.000.000		Dispertan
161	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.947.000.000		Dispertan
162	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	2.092.600.000	APBN	Dispertan
163	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hasil Tanaman Pangan	437.600.000	APBN	Dispertan
164	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	681.214.000	APBN	Dispertan
165	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.318.000.000	DBHCHT dan APBD	DKP
166	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	159.250.000		Disnakkan
167	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.731.959.000	DAK Kelautan Perikanan dan APBD	Disnakkan
168	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	257.641.750		Disnakkan
169	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	644.923.000		Disnakkan
170	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	30.050.000		Disnakkan

Boyolali, Januari 2020

BUPATI BOYOLALI



Drs. SENO SAMODRO